

POLRI TERBURUK DI ASIA ??

Oleh : Anton Tabah

Dosen "Politik & Strategi UGM Yogyakarta

Beberapa media massa Indonesia sejak tanggal 3 Juni 2002 melansir hasil survey lembaga penelitian Hong Kong, Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang menyatakan bahwa, "seluruh system hukum di Indonesia saat ini sudah parah sehingga perlu perbaikan menyeluruh. Namun pemerintah Indonesia diragukan kemampuannya untuk melakukan perbaikan." (Koran Tempo, 3/6). Hasil survey juga menyimpulkan bahwa kondisi macam itu telah berdampak, menjadikan system peradilan dan kepolisian di Indonesia terburuk di Asia. (Republika, 4/6). Selain buruk, Polri juga dilansir sebagai lembaga yang korup karena pengaruh SDM yang mayoritas anggotanya berpendidikan rendah dan bergaji rendah. (Koran Tempo, 3/6). Demikianlah sepenggal kalimat hasil survey PERC yang dilansir beberapa media massa kita.

Tidaklah adil jika temuan PERC tidak dikaji secara cermat, kalimat demi kalimat, misalnya dengan serta merta menilai Polri terburuk di Asia padahal hanya dari hasil survey suara kelompok kecil (investor asing) dan terhadap system hukum Singapura dan Malaysia yang dinilai terbaik karena system check and recheck masih hidup sedang di Indonesia dinilai sudah mati? Tak ada check and recheck lagi? Apakah hal ini implikasi dari kebebasan berbicara dan kebebasan pers di Indonesia yang sangat dahsyat dewasa ini yang dinilai dunia bahwa kebebasan berdemokrasi di Indonesia adalah yang paling liberal di dunia? Bahkan banyak yang berseloroh keberhasilan reformasi Indonesia hanya satu yaitu kebebasan yang nyaris tanpa batas. Lihat orang bisa mengumpat semaunya. Lihat pers bisa menyajikan apa yang mereka peroleh semaunya tanpa check

and recheck. Semua ini bermuara pada system hukum yang kedodoran menghadapi kebebasan tak terkendali semacam itu.

Hasil survey PERC juga menjadi bias jika melihat cara survey yang sangat acak. Lihat hanya beberapa negara yang disurvei bahkan tak semua negara Asia malah tiba-tiba memasukkan Amerika dan Australia. Karena itu survey ini masih diragukan validitasnya selain mungkin ada "interest tertentu korelatif dengan indikasi disharmoni beberapa negara terhadap Indonesia? Coba lihat hasil survey PERC secara keseluruhan sebagai berikut : Amerika Serikat dengan nilai 1,67, Australia (1,82), Singapura (1,7), Hong Kong (2,9), Jepang (3,67), Korea Selatan (4,83), Malaysia (6,29), Taiwan (6,33), Vietnam (7,08), India (7,33), Cina dan Filipina (7,78), Thailand (7,96) dan Indonesia (9,83).

Dari apa yang disajikan PERC itu, penelitian dan penilaian macam apakah yang dijadikan pedoman dan dari kelompok mana yang diteliti? Variabel-variabel apa yang dijadikan parameter survey sehingga PERC mudah menyimpulkan Polri terburuk di Asia? Kalau hanya ungkapan para investor asing atas penilaiannya pada suatu lembaga, apakah hal itu bisa dijadikan dasar penilaian? Berbagai pertanyaan macam ini sangat penting untuk menguji validitas survey agar suatu lembaga semacam PERC tidak rusak reputasinya.

Keranjang Sampah ? :

Jika berbicara system hukum, mestinya yang dikaji bukan hanya kepolisian tetapi system secara menyeluruh setidaknya yang termasuk dalam tataran criminal justice system yaitu kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan pengacara (lawyer). Belum lagi kesisteman dalam sebuah birokrasi kesistem-

an dalam sebuah birokrasi kenegaraan (public administrations) yang luas. Di era reformasi ini memang telah menjadikan berbagai system di Indonesia yang terburuk atau setidaknya merosot dari posisi sebelum era reformasi. Misalnya apa saja mutu pendidikan di Indonesia juga yang terburuk bahkan dibawah Vietnam yang baru saja dilanda badai keterpurukan sosial ekonomi yang parah dan panjang. Tetapi kenapa PERC (Hong Kong) dan media massa Indonesia hanya menyoroti Polri ?

Jawabnya, kepolisian sering dijadikan "keranjang sampah", tempat berbagai hal yang buruk dan kegagalan dialamatkan. Kepolisian adalah profesi yang murah cacian dari pada pujian. (Baca pomco Swedia, 1836). Publik yang dipuaskan oleh kinerja polisi tak pernah mempublikasikan tetapi jika dikecewakan, caci maki pun akan dipublikasikannya secara luas. Saya teringat dialog dengan Frans Magnis Suseno beberapa waktu yang lalu. Ia katakan: *"Berpuluh tahun tinggal di Indonesia tak pernah sekalipun dikecewakan oleh kinerja Polri, tetapi hampir setiap saat bepergian keluar negeri saya sering dikecewakan oleh cara kerja polisi di negara yang saya kunjungi."* Mungkin ungkapan Romo Frans ini salah satu yang langka diterima oleh Polri tadi.

Para pakar telah sepakat bahwa profesi kepolisian sebagai "mobile officium" (profesi mulia karena pekerjaan pokoknya yang memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat disisi lain menjadi profesi yang kurang disenangi karena polisi harus mendisiplinkan masyarakat kapasitasnya selaku penegak hukum. Dari "kemuliaan" profesi tersebut sering terkooptasi dengan perilaku menyimpang oknum-oknumnya yang acap kali menurunkan kadar kemuliaan profesi tadi. Tapi ini bukan monopoli profesi kepolisian

apalagi monopoli Polri. Di berbagai negara adi daya juga terjadi bahkan polisi inggris yang menjadi legenda masing sering dikeluhkan kinerjanya dengan adagium masyarakat inggris yang nyaring kita dengar, "the end justified the means" (tujuan menghalalkan cara). (Lihat, Fattah, 1997). Demikian pula kepolisian Amerika Serikat yang telah berulang kali membentuk komisi pengawas kepolisian dan juga Kanada yang sejak dua dekade lalu membentuk komisi kepolisian dengan nama RCMP (Royal Canadian Mounted Police). Survey RCMP serasa cukup signifikan, "a wide range of crimes and illegal activities" (pelanggaran hukum yang luas).

Hal ini juga telah saya coa diskusikan secara singkat saat diwawancarai Pro2 FM 3 Juni lalu tentang pungli oleh oknum-oknum Polisi Lalu Lintas di Jakarta yang dikeluhkan masyarakat (Baca Pro 2 FM). Tetapi siapa yang memulai ? Masyarakat atau polisi ? Sulit kiranya mengurai benang kusut itu seperti sulitnya menyimpulkan antara telur dan ayam. Asal usul perilaku tak seyogya seperti ini mungkin bisa dilacak sampai pada pertukaran antara kekuasaan yang diberikan oleh UU pada polisi dan faktor peluang menjadi dominan karena polisi berada di wilayah terdepan dari eksekutif yang berhubungan dengan masyarakat. Faktor peluang juga diberikan hukum untuk mengambil tindakan dalam situasi tertentu menurut "penilaiannya sendiri" (deskresi) yang telah menjadi standar kepolisian global. Namun jika tidak arif hal tersebut dapat menggiring pada tindakan diskresi fungsional karena menempatkan pribadi-pribadi polisi sebagai faktor sentral dalam penegakan hukum di lapangan.

Seperti survey PERC faktor dominannya karena gaji Polri yang sangat rendah dan mungkin terendah di dunia. Kira-

nya hal itu dapat dilihat data tingkat kesejahteraan Polri yang terendah di Asia jika mengacu standar PBB gaji polisi dibanding dengan gaji pegawai keuangan negara. Gaji seorang anggota Polri dengan gaji seorang pegawai keuangan negara pada masa kerja dan golongan yang sama ternyata gaji Polri saat ini hanya 23% saja. Lihat Polisi Singapura (150%), Malaysia (67%), Thailand (47%), Filipina (51%), Hong Kong (110%), Vietnam (38%), dll.

Hanya 23% gaji dari seorang pegawai keuangan negara golongan terendah masa kerja nol tahun jika diterima seorang anggota Polri berpangkat terendah masa kerja nol tahun. Semakin tinggi golongan dan keangkatannya ternyata Polri semakin jauh tertinggal ke bawah. Contoh gaji seorang Kolonel Polisi (4C) jika dibandingkan dengan Gol. 4C seorang pegawai Keuangan Negara ternyata hanya sekitar 12%nya saja. Ini terasa sangat tak seimbang dan kondisi semacam inilah yang belum pernah diketahui. Jangankan PERC, lembaga-lembaga kajian dan penelitian di Indonesia semacam Police Watch saja saya yakin tak mengetahui. PERC seharusnya mengadakan kajian detail dan rinci terlebih dahulu tentang bagaimana melakukan penelitian dan bagaimana Polri yang reality di lapangan jangan hanya dengan model acak seperti itu agar dapat membantu mencari solusi yang tepat dan akurat. Dan solusi itu harus benar-benar applicable bukan hanya sesuatu yang ada di angan-angan. Misalnya solusi 10 tahun yang lalu pemerintah akan menaikkan gaji seorang anggota Polri minimal 40% dari seorang gaji pegawai keuangan negara tetapi tak pernah direalisasikan sampai sekarang.

Melihat fakta ini saya teringat lelucon tentang seminar para petinggi tikus yang membahas tikus semakin habis karena diterkam kucing. Seminar pun gemuruh tempik sorak telah menghasilkan solusi bri-

liyant yaitu untuk menangkal ancaman kucing maka leher kucing harus dikalungi lonceng agar keberadaan kucing dapat dipantau. Tetapi gemuruh tempik sorak para tikus itu tiba-tiba senyap ketika seekor tikus yang lain bertanya memelas; "Lalu siapa yang akan memasang lonceng di leher kucing?". Ini juga berangkat dari teori Boston (E. Adlow, 1988) bahwa kepolisian hanyalah cermin dari masyarakatnya. Polisi tak bisa bersih kalau memang system sosial masyarakatnya masih kotor, seperti polisi tak bisa santun di tengah masyarakat yang kurang ajar. Contoh sulit rasanya polisi harus lemah lembut menghadapi demo dengan bom Molotov. Ini terkait dengan system hukum dan pers saat ini yang lebih membela demonstran meski demo yang anarkis sekalipun.

Integritas Moral :

Memang dalam teori profesi apapun yang bisa memacu kinerjanya dalam menggeluti profesinya adalah integritas moral yang cukup. Tetapi integritas moral harus sebanding dengan resiko profesi. Jika tak sebanding maka yang terjadi adalah pengotoran integritas tadi. Berat dan resiko tugas polisi memang bisa dilihat kasat mata. Profesi yang tak mengenal cuaca, ruang dan waktu. Lihat polisi di Jakarta betapa sibuknya mereka siang dan malam belum lagi oleh cuaca panasnya mentari di siang hari, dinginnya malam, basah kuyup karena hujan dan berapa kadar carbon yang mereka hirup setiap hari. Tetapi apakah kita telah menghargai Polri kita sepadan dengan berat dan resiko pekerjaannya itu ?

Polisi Singapura lebih dua dekade yang silan juga dalam kondisi sangat buruk. Korupsi merajalela. Kemudian solusi mensejahterakan polisi Singapura dilakukan dan kini dengan gaji tertinggi di Asia. Karena itu lumrah jika kinerja Polisi Singapura juga yang terbaik di Asia?.

Bicara keburukan polisi juga bisa melihat Polisi Amerika Serikat khususnya di Kota Megapolitan New York. Belum lama ini survey dilakukan disana oleh Komisi Knapp terhadap kasus korupsi di Kepolisian Negara Bagian New York mengungkap kasus korupsi terbesar yang belum pernah dilakukan oleh organisasi kepolisian manapun sebelumnya. Setidaknya ada 3 hal penting yang dapat kita jadikan pelajaran dari Komisi Knapp. Pertama: anak buah yang di lapangan korupsi dan para atasan mendapat jatah dari hasil korupsi itu. Kedua: jika ada korupsi di kepolisian maka secara parallel juga terjadi korupsi di instansi-instansi dan tempat-tempat lain. Ketiga: penyimpangan di kepolisian sering terjadi karena atas permintaan departemen-departemen lain kepada polisi untuk mengamankan kepentingannya.

Hasil dari Komisi Knapp tersebut melahirkan teori radikal yang belum tentu benar yaitu: "Corrupt is a given feature of every police system in the world". Statement ini cukup berani karena akan lebih memancing emosional ketimbang akal sehat sehingga mudah ditafsirkan sebagai "kok memojokkan polisi?"

Lebih rinci lagi jika mengkaji korupsi dari kacamata sosiologi seperti yang dilakukan Punch (1985), mengelompokkan korupsi dalam 4 jenis; Pertama; straightforward corruption-tergantung seberapa yang akan diperoleh. Kedua; combative corruption-memanfaatkan wacana hukum sehingga terselubung secara hukum maupun sosial dianggap wajar. Ketiga; predatory corruptions-pembiaran bahkan menstimulir terjadinya kejahatan kemudian menangkapnya untuk dijadikan "obyek" hukum. Keempat; Corruption as perversion of justice; penyalahgunaan jabatan dan sumpah jabatan.

Tulisan ini bukan pembenaran, tetapi untuk bercermin. Tulisan ini bukan untuk membuat Polri nglokro (putus asa dan malas bekerja) tetapi untuk memotivasi dan tulisan ini juga untuk menyadarkan negara dan bangsa bahwa memang untuk membangun disiplin bangsa diperlukan kepolisian yang kuat, ini yang belum dilakukan Indonesia dan itu tak mudah. Dari tulisan ini diharapkan semua pihak bisa berfikir jernih, benarkah Polri terburuk di Asia? Pembaca yang baik akan lebih mengerti terhadap kepolisiannya.

